



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Penyelesaian Tenaga Non-ASN dalam Transformasi ASN menuju Birokrasi yang Profesional dan Berkelas Dunia

Alex Denni

Deputi SDMA Kementerian PANRB

bangga
melayani
bangsa



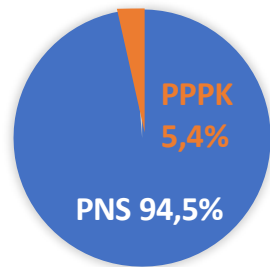
panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Demografi ASN Saat Ini

**ASN INDONESIA
per 31 Maret 2022***

4.261.783



PNS 4.029.748



PPPK 232.035



■ Instansi Pusat
■ Instansi Daerah

Pria : 1.968.275

PNS : 1.889.468

PPPK : 78.807

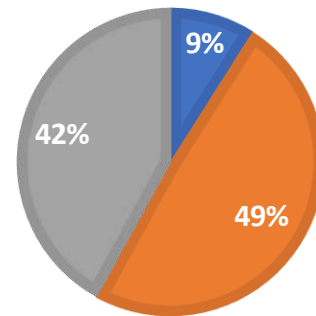


Wanita : 2.293.508

PNS : 2.140.280

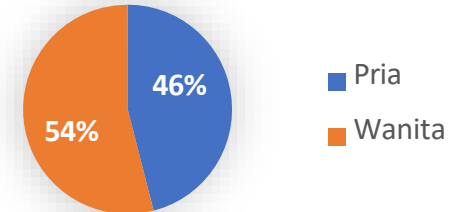
PPPK : 153.228

**Persentase ASN
berdasarkan Jabatannya**

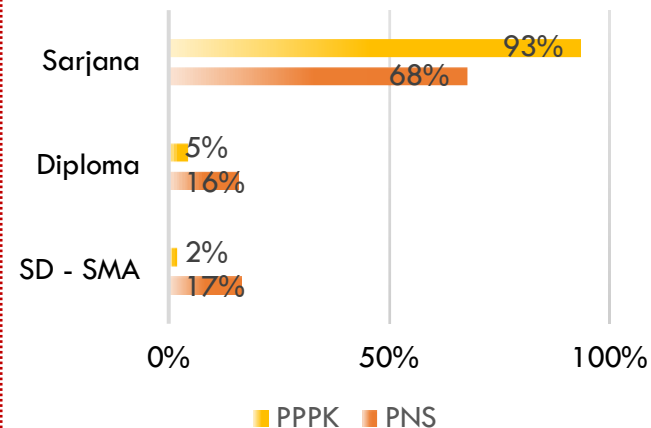


■ Struktural
■ Fungsional
■ Pelaksana

Persentase ASN sesuai Gender



**Persentase ASN Berdasarkan Jenjang
Pendidikannya**



JF Medis/ Tenaga Kesehatan

PNS : 389.968

PPPK : 2.328



Guru

PNS : 1.345.201

PPPK : 312.242



Teknis

PNS : 242.516

PPPK : 1.442



Dosen

PNS : 75.430

PPPK : 1.349

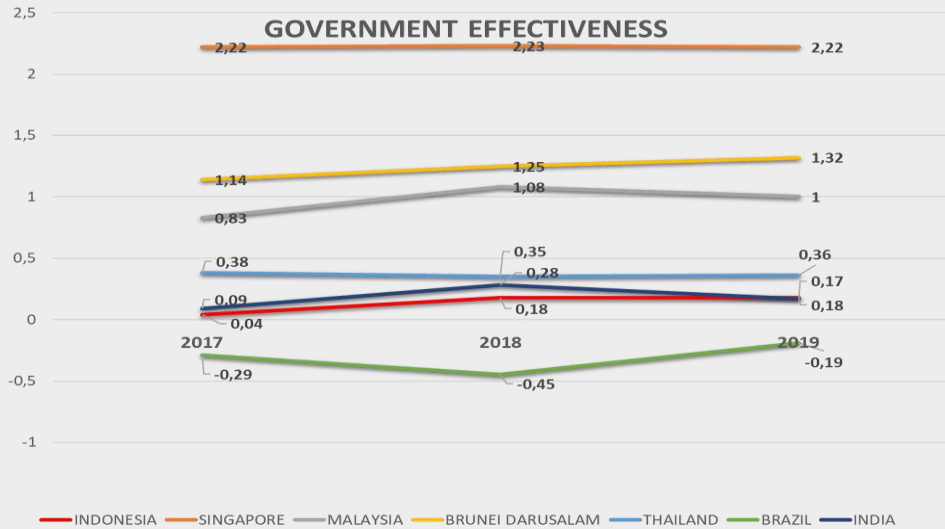


**PPPK Penyuluh
Pertanian
11.429**



**PPPK Tendik
1.442**

Perlu peningkatan
kinerja ASN secara
SIGNIFIKAN!



ASEAN CPI 2020

Rank	CPI 2020	Country
3	85	Singapore
35	60	Brunei
57	51	Malaysia
86	40	Timor-Leste
102	37	Indonesia
104	36	Vietnam
104	36	Thailand
115	34	Philippines
134	29	Laos
137	28	Myanmar
160	21	Cambodia

THE WORLD BANK | DOING BUSINESS

Economy	Ease of Doing Business Rank	Rank within group	Starting a Business	Dealing with Construction Permits	Getting Electricity	Registering Property	Getting Credit	Protecting Minority Investors	Paying Taxes
Singapore	2	1	1	3	6	2	5	2	2
Hong Kong SAR, China	3	2	2	1	1	7	5	4	1
Malaysia	12	3	15	2	2	4	5	1	9
Taiwan, China	15	4	4	4	4	1	15	5	3
Thailand	21	5	7	8	3	10	9	2	6
China	31	6	5	7	5	3	13	7	17
Brunei Darussalam	66	7	3	10	8	19	1	13	12
Vietnam	70	8	14	5	7	9	2	11	18
Indonesia	73	9	18	17	10	14	9	8	10

2020 General population	2021 General population	YTY Change
54 Global 27	56 Global 27	+2
82 China	77 India	-2
79 India	72 China	-10
73 Indonesia	72 Indonesia	1
66 Thailand	69 Saudi Arabia	+8
65 UAE	68 Singapore	+8
62 Mexico	67 UAE	+2
62 Singapore	66 Malaysia	+6
61 Saudi Arabia	63 The Netherlands	+8
60 Malaysia	61 Thailand	4
57 Kenya	59 Australia	+12
53 Canada	59 Kenya	+2
53 Colombia	59 Mexico	3
51 Brazil	56 Canada	+3
50 S. Korea	53 Germany	+7
49 Argentina	52 Italy	+3
49 Italy	51 Brazil	0
47 Australia	50 Ireland	+5
47 U.S.	48 Colombia	5
46 Germany	48 France	+3
45 France	48 S. Africa	+4
45 Ireland	48 U.S.	+1
44 S. Africa	47 Argentina	-2
42 Japan	47 S. Korea	-3
40 UK	45 Spain	0
30 Russia	45 UK	+3
	40 Japan	-2
	31 Russia	+1



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kasus Jual Beli Jabatan ASN (2017 – 2022)

Jual Beli Jabatan, Mantan Kakanwil Kemenag Sumut Dihukum 2 Tahun Penjara

Kamis, 8 Juli 2021 18:04
Reporter :

Bupati Nganjuk Novi Patok Kades Rp15 Juta dan Cam

Senin, 10 Mei 2021 18:59
Reporter : Muhammad Genan



bupati nganjuk novi rahman hid
Merdeka.com - Bupati Ng

Jual Beli Ja Ungkap T Itu, Besarn

Selasa, 31 Agustus 2021 04:26 WIB



Jumpa pers kasus dugaan suap jual b
Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan,
DPR Hasan Aminuddin jadi tersangka

Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6 dan Rektor Unila Tersangka Suap Penerimaan Mahasiswa Baru, Ini 5 Faktanya

Kompas

Widhia Arum Wibawana - detikNews

Minggu, 21 Agu 2022 12:08 WIB



2 komentar

BAGIKAN



Rektor Unila Tersangka Suap Penerimaan Mahasiswa Baru, Ini 5 Faktanya | Foto: Wildan/detikcom

iti Cirebon Dituntut 7 Tahun Penjara



apkan Walikota Tanjung Balai Tersangka Kasus Suap Jual Beli Jabatan

Teraslampung.com • Korupsi
1/2021

Jadi

BAGIKAN





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

5 Fakta Kecurangan Tes Buol, Pasang Remote, Jawab Soal 8 Detik

359 CPNS Didiskualifikasi karena Terbukti Curang, Ini Modusnya

Kompas.com, 26 April 2022, 15:30 WIB



Komentar ²

Mohammad Adrianto S, Okezone · Selasa 26 Oktober 2021 20



Lihat Foto

Anggota CPNS Peserta Tak Mau Tempat Duduk Jawab Soal Cepat

Selasa 26 Oktober 2021 10:25 WIB



menpan.go.id

TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA

BIROKRASI BERKELAS DUNIA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG KOMPETITIF

AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN EFEKTIF

Transformasi Organisasi

Delaying
Eselonisasi

Organisasi yang
Agile, Fleksibel, dan
Kolaboratif

Transformasi SDMA



Transformasi Sistem Kerja

Super Apps (Aplikasi Umum SPBE)

Digitalisasi
Pelayanan Publik

Digitalisasi
Proses Bisnis Pemerintah

Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Pada saat yang sama, kita juga masih memiliki PR untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang sudah cukup lama juga belum tuntas penyelesaiannya. Prosesnya sendiri sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2005. Merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007, **Pejabat Pembina Kepegawaian sudah dilarang mengangkat tenaga honorer.**

PP 48 TAHUN 2005 jo. PP 43 TAHUN 2007

THK1 dibiayai dari APBN/APBD dengan kriteria:

- ☐ Diangkat PyB di Instansi Pemerintah;
- ☐ Pada 31 Des 2005, telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus menerus;
- ☐ Pada 1 Jan 2006, telah berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun.

Pasal 8 menjelaskan bahwa PPK dilarang mengangkat TH atau sejenisnya.

Proses pendataan awal terdapat 920.702 TH, kemudian diangkat sebanyak 860.220 THK1.



920.702 TH
Pendataan Awal



860.220 THK1
Diangkat PNS Tanpa Seleksi
(326.974 = 38% Guru)

+



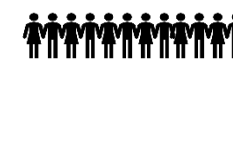
60.482 THK1
Tidak Memenuhi
Kriteria

11 x



648.462 THK2
Mengikuti Ujian

=



209.872 THK2
Lulus Seleksi Thn 2013
(108.109 = 52% Guru)

+



438.590 THK2
Tidak Lulus Seleksi

PP 56 TAHUN 2012

THK2 dibiayai bukan dari APBN/APBD dengan kriteria yang sama dengan TH (yang dikenal sebagai THK1).

Pasal 6A ayat (2) menjelaskan bahwa Seleksi dilakukan 1 kali (atas kesepakatan 3 Komisi DPR: Komisi II, VIII, X periode pada waktu itu)

Proses pendataan kembali dilakukan karena protes TH yang 'tercecer' (usulan diajukan oleh PPK) terdapat 673.737 TH (11 kali dari sisa THK1 yang tidak diangkat), yang mengikuti ujian sebanyak 648.462 TH yang disebut THK2, kemudian lulus sebanyak 209.872 THK2.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

UU ASN no 5 tahun 2014, disebutkan bahwa Aparatus Sipil Negara (ASN) terdiri dari **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**.

Kebijakan penyelesaian tenaga honorer di instansi pemerintah ini dilakukan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dimana **Instansi Pemerintah diberikan waktu selama 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk menyelesaikannya.**

Jumlah THK-II Lulus dan Diangkat dalam Seleksi CPNS 2012

Jumlah THK-II Lulus dan Diangkat dalam Seleksi CPNS 2018

Jumlah THK-II Lulus dan Diangkat dalam Seleksi PPPK 2019

Jumlah THK-II submit seleksi CPNS dan PPPK 2021

DARI 648.462 HASIL UPDATE DATABASE, TERDAPAT 209.872 THK-II LULUS SELEKSI

Jabatan	Jumlah
Guru	6.638
Kesehatan	174

TOTAL 6.812 THK-II

Jabatan	Jumlah
Guru	33.551
Kesehatan	1.747
Penyuluh Pertanian	63

TOTAL 35.361 THK-II

Jabatan	Jumlah
Pendidik	45.456
Kesehatan	1
Penyuluh	1
Administrasi	6.034

TOTAL 51.492 THK-II (proses seleksi CASN masih berlangsung)

Jabatan	Jumlah
Guru	157.210
Dosen	86
Kesehatan	6.091
Penyuluh	5.803
Administrasi	269.400

TOTAL 438.590 THK-II

Jabatan	Jumlah
Pendidik	156.908
Kesehatan	6.546
Penyuluh	2.392
Administrasi	278.841

TOTAL 444.687 THK-II

Terdapat tambahan 2.071 THK-II hasil seleksi CPNS 2012 dengan status BTL (Berkas Tidak Lengkap)

Jabatan	Jumlah
Pendidik	123.502
Kesehatan	4.782
Penyuluh	2.333
Administrasi	279.393

TOTAL 410.010 THK-II

Seleksi PPPK 2019 juga merekrut dosen dan tenaga pendidik di PTNB sejumlah 2.854 dan Penyuluh Pertanian THL sejumlah 11.590



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Reminder dan Audiensi



Reminder kepada PPK terkait Penataan ASN sesuai PP 49/2018



**Rapat Pembahasan Penyelesaian Tenaga Non ASN
di Lingkungan Pemda pada tanggal 24 Juni 2022**
Mengundang Sekda provinsi, Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Surat Pemberitahuan Pendataan Non ASN hingga tanggal 30 September 2022



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ISI /M.SM.01.00/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan
Instansi Pemerintah

22 Juli 2022

Yth.

1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat;
 2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah;
- di
Tempat



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ALUR PENYELESAIAN TENAGA HONORER

Persoalannya kompleks, solusi tidak bisa tunggal





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ALUR PENYELESAIAN TENAGA HONORER



Pemetaan



**Penyusunan
kebijakan**



**Penyelesaian
dengan
pengawasan**

Output Yang Diharapkan

- 1) Adanya Kesamaan Persepsi Terhadap Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 2) Mendorong Masing-Masing Instansi Pemerintah Untuk Mempercepat Proses *mapping*, Validasi Data dan Menyiapkan *RoadMap* Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 3) Membangun Komunikasi Positif Atas Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

bangga
melayani
bangsa